

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti memiliki peran dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia, baik dari segi unit usaha, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap produk domestik bruto, ekspor dan investasinya. Pada tahun 2013, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia mencapai 56,6 juta. Dari jumlah tersebut, 99,8% merupakan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini. Usaha kecil seperti koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 56% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2013). Dengan kata lain, UMKM dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara. Di banyak negara, UKM memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Tercatat jumlah UKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas dan Schrooten, 2006). Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. Sektor ini setiap tahunnya rata-rata memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta mampu mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara tersebut (Zimele, 2009). Pencapaian yang luar biasa dan potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah pendanaan. Untuk mengembangkan usaha serta masalah pemasaran produk kepada masyarakat. Jika UMKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, maka bisa jadi banyak pelaku UMKM yang tidak bisa

melanjutkan usahanya. Untuk pengembangan tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sebagian besar UMKM hanya menggunakan dana (modal) pribadi dalam menjalankan usahanya, dan tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih baik dibutuhkan dana yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dengan dana perusahaan. Oleh sebab itu, tidak hanya modal pribadi saja yang dibutuhkan tetapi juga dana yang berasal dari pinjaman pada pihak ketiga seperti bank, KUR atau sejenisnya sebagai suntikan modal. Namun, fenomena yang ada, banyak UMKM saat ini yang hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usaha mereka. Meskipun saat ini telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa di dapatkan pada beberapa bank tertentu seperti Bank Jatim dan Bank UMKM Alasan UMKM tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu skala usaha yang masih kecil dan lama usaha yang masih baru (1-3tahun). Alasan lainnya yaitu rumitnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit. Salah satu syaratnya yaitu laporan keuangan UMKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya. Penyebabnya yaitu UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Putra dan Kurniawati, 2012). Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006). Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan manfaat lainnya (Warsono, 2009). Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009).

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yaitu Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Meskipun peraturan pencatatan akuntansi telah jelas adanya, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar. Untuk mengatasi masalah tersebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah membuat Standar Akuntansi bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jika dilihat dari tingkat kekompleksitasannya, PSAK ETAP lebih mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan PSAK lainnya. Selain itu, SAK ETAP ini juga lebih sederhana jika dibandingkan dengan PSAK pada umumnya. Jati (2009) dalam Rudiantoro dan Siregar (2011) menyatakan bahwa mayoritas UMKM hanya melakukan pencatatan tentang jumlah dana yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, keluar masuknya barang dan jumlah utang atau piutang yang dimiliki. Pencatatan yang seperti itu tidak dapat membantu mereka dalam mendapatkan akses ke bank. Akan tetapi, penerapan SAK ETAP tidak begitu saja dapat diterima oleh UMKM. Masih banyak UMKM yang tidak menerapkan pembukuan yang sesuai standar. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal (Hutagaol, 2012), yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar, adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis. Oleh karena itu, mereka enggan untuk menerapkan pembukuan. Diharapkan dengan adanya pelatihan pencatatan akuntansi dan

pemahaman tentang SAK ETAP, UMKM untuk ke depannya dapat membuat laporan keuangan yang baik, sehingga dapat mempermudah UMKM dalam mencapai akses bank dan pinjaman lainnya untuk mengembangkan usaha mereka.

Penelitian ini akan membahas tentang **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap**. Faktor-faktor yang akan dibahas meliputi pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha. Objek penelitian ini yaitu UMKM dengan kategori usaha kecil dan menengah yang ada di Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena dalam penelitian ini adalah pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Kabupaten Jember tahun 2016 jumlah UMKM yang tersebar di wilayah Jember berjumlah 3070 UMKM yang bergerak disemua bidang. Untuk bidang industri sendiri terdapat 182 UMKM, tetapi mayoritas pengusaha UMKM belum melakukan pelaporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal (Hutagaol, 2012), yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar, adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis. Oleh karena itu, mereka enggan untuk menerapkan pembukuan. Diharapkan dengan adanya pelatihan pencatatan akuntansi dan pemahaman tentang SAK ETAP, UMKM untuk ke depannya dapat membuat laporan keuangan yang baik, sehingga dapat mempermudah UMKM dalam mencapai akses bank dan pinjaman lainnya untuk mengembangkan usaha mereka.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana cara meningkatkan pemahaman UMKM atas SAK ETAP?

1.4. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP ?
2. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP?
3. Apakah jenjang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP?
4. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP ?
5. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP ?

1.5. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh jenjang pendidikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh lama usaha terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran usaha terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai perbandingan atau referensi bagi penelitian pada topik yang sama di masa yang akan datang.

2. Bagi Praktisi

- a. Memberikan masukan kepada pemilik UMKM, khususnya di Kabupaten Jember untuk mengintensifkan penyelenggaraan sosialisasi SAK ETAP guna meningkatkan pemahaman atas aturan SAK ETAP.
- b. Memberikan masukan kepada pemilik UMKM untuk meningkatkan akuntabilitas dalam bentuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.